

Evaluasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus pada Perusahaan Peleburan Tembaga)

Nirmalasari Dwi Cahyaningrum^{1*}, Evony Silvino Violita²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹nirmalasd95@gmail.com, ²evony.silvino@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 16 Mei 2023

Disetujui : 20 Mei 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

The issue of sustainability has begun to become the focus of worldwide attention in all aspects. The copper smelting industry can be said to be one of the causes of emergences of environmental and social problems so the sustainability strategy becomes an essential thing for this industry This research is designed to examine the sustainability reporting issued by one of the copper smelting industry in Indonesia, which is the first time the company has issued a sustainability report in 2021 which is after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017. The method used in this research is a case study by doing content analysis qualitative where content analysis is performed on the information published in the sustainability reports disclosure to use Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) number 16 and also the Global Reporting Initiative (GRI) as assessment parameters, as well as interviews with a corporate secretary, become supporting data. Then, this research fills in the inner gap empirical approach to analyze the sustainability report disclosure within the company smelting industry. The results of this study show that the revelation of the company's sustainability report in 2021 has fulfilled the regulations by POJK No. 51/POJK.03/2017 However, in terms of the quality of the contents of each component, it is still not explained comprehensively. One of the copper smelting industries in Indonesia's sustainability disclosure includes 35 indicators in the GRI standard.

Keywords: Copper Smelting; GRI Standard; POJK 51; SEOJK 16; Sustainability Reporting

PENDAHULUAN

Perusahaan yang bergerak dalam industri peleburan tembaga harus memiliki kegiatan berkelanjutannya, industri tersebut berpotensi dalam mencemari lingkungan dan alam. Industri peleburan tembaga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang terjadi, terutama adalah debu dan asap yang keluar dari tungku, debu dari pasir cetak, bising dan getaran dari mesin dan lain-lain (Prayudi, 2005). Pasalnya sudah sering terjadi di Indonesia terkait lemahnya perhatian perusahaan pada aspek sosial dan lingkungan (Rudyanto & Siregar, 2017).

Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan memiliki tantangan dalam melakukan keberlanjutan. Cara menuju keberlanjutan adalah dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan bagi perusahaan merupakan publikasi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang bisa dijadikan media bagi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Tarigan & Samuel, 2015).

Implementasi kewajiban dalam pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia sudah efektif berjalan pada tahun 2020. Dalam mendorong motivasi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan

di Indonesia sudah berkembang dan telah diatur secara terperinci dalam POJK No.51/POJK.03/2017 berkaitan Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik peraturan tersebut disebut juga dengan POJK 51. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang hanya menekankan pada konsep dan pengungkapan tanggung jawab sosial, pada pasal 10 POJK 51 sudah mengharuskan LJK, emiten, dan perusahaan publik diharuskan untuk menyusun laporan berkelanjutan dan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tenggang waktu harus disampaikan pada 30 April 2021. Kemudian adapun SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang disebut sebagai SEOJK 16 berisikan panduan dan contoh secara rinci atas pengungkapan keberlanjutan yang baru terbit pada 29 Juni 2021.

Penelitian mengenai evaluasi dari laporan keberlanjutan masih jarang ditemukan, namun demikian sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang telah membahas hal tersebut. Penelitian ini adalah perkembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan sawit Zharifah, 2021 yang mengevaluasi pengungkapan laporan keberlanjutan dan strategi keberlanjutan dari perusahaan kelapa sawit dengan metode analisis konten dimana perusahaan sawit tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek dari SEOJK 16.

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan industri peleburan tembaga dimana PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TMS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan tembaga terkemuka di Indonesia. TMS melakukan operasionalnya berdampingan dengan pemukiman warga sehingga memungkinkan untuk menimbulkan risiko sosial mengingat lokasi perusahaan beroperasi.

Kemudian, hal yang menarik dari PT TMS baru saja menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021 dimana laporan keberlanjutan tersebut kali pertama perusahaan menerbitkannya. Dengan adanya gap dari pemberlakuan POJK 51 pada tahun 2019 sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut atau ditelusuri keberadaan informasinya dalam laporan keberlanjutan PT TMS 2021. Kemudian, kualitas informasi dari setiap item yang diungkapkan harus dianalisis dengan dianalisis dengan menggunakan SEOJK 16 akan dibandingkan dengan standar GRI dimana merupakan standar internasional. Hal tersebut merujuk pada tingkatan pengungkapan dalam laporan tersebut yang kemudian akan dievaluasi mengenai kekurangan yang ditemukan. Pembeda lainnya dari penelitian terdahulu adalah adanya pengumpulan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak perusahaan sebagai pendukung dari hasil laporan yang dipublikasikan perusahaan.

Teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori institusional menjadi *grand theory* yang dipergunakan dalam penelitian ini. (Suchman, 1995) menyebutkan bahwa legitimasi merupakan pemahaman umum atas tindakan entitas harus tepat dan juga berimbang dengan sistem sosial yang dilandaskan dengan norma, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi di dalamnya. Teori legitimasi mengartikan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bisa memastikan dan menggiring operasi perusahaan bisa diterima dan mendapat dukungan oleh masyarakat di sekitar perseroan beroperasi.

Adapun teori pemangku kepentingan yang diisyaratkan berupa pengembangan teori legitimasi. (Freeman et al., 2010) menyatakan bahwa organisasi harus bertindak secara etis dan sah cara berpikir pemangku kepentingan, dengan asumsi semua pemangku kepentingan memiliki "atribusi universal, kepribadian moral". Teori stakeholder mempertegas bahwa keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepaskan dengan stakeholder, sebab mereka adalah para pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan serta dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan. Untuk itu, survival perusahaan sangat tergantung pada sejauh mana perusahaan memperoleh legitimasi dari stakeholder (Hasanah & Rudyanto, 2020).

Menurut teori institusional, perusahaan dapat kurang lebih secara sadar memilih strategi yang berbeda untuk mengatasi ekspektasi sosial seperti kinerja perusahaan (DiMaggio & Powell, 1991). Berdasarkan teori institusional, lingkungan institusi perusahaan dapat mempengaruhi strategi. Hal tersebut bermaksud bahwa kondisi sebuah institusi dapat mengubah perilaku perusahaan untuk bertindak bertanggung jawab secara sosial bahwa perusahaan harus memiliki visi perusahaan dalam mencapai keberlanjutan dan strategi keberlanjutan jangka panjang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan institusi.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

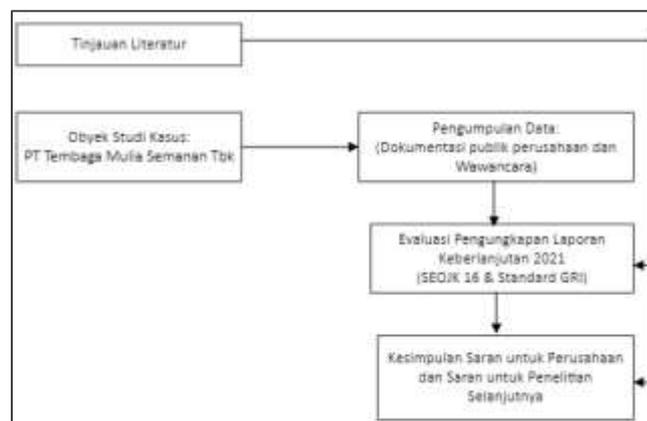
Zharifah (2021) melakukan penelitian dengan topik “Evaluasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan Strategi Keberlanjutan Pasca Implementasi POJK 51: Studi Kasus PT Dharma Satya Nusantara Tbk” dimana perusahaan tersebut bergerak pada industri perusahaan kelapa sawit dengan periode laporan keberlanjutan tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan analisis konten melalui publikasi perusahaan dengan acuan SEOJK 16 dan GRI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan periode 2020 belum sepenuhnya memenuhi informasi yang diwajibkan SEOJK 16.

Ramadani Kurnia (2019) melakukan penelitian atas pengungkapan pada PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tahun 2016 dan 2017 yang menyimpulkan bahwa meskipun PGN sudah mengimplementasikan Standar GRI dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan, namun tidak semua topic yang ada di dalam Standar GRI tersebut diungkapkan dimana pada tahun 2016 hanya memenuhi 59% dan 2017 memenuhi 67%.

Kanigoro (2020) meneliti pengungkapan laporan keberlanjutan pada perguruan tinggi Indonesia dengan indikator GRI G4 dimana hasil penelitiannya menginformasikan bahwa tingkatan pengungkapan informasi keberlanjutan pada perguruan tinggi di Indonesia lebih rendah dibanding dengan perguruan tinggi di negara lain seperti Kanada dan Lithuania. Selain itu, pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia masih dalam lingkup yang terbatas dan belum terdapat perguruan tinggi yang melaporkan pengungkapan informasi keberlanjutan dalam laporan terintegrasi.

METODE

Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini studi kasus pada PT Tembaga Mulia Semanan (TMS) yang menerbitkan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2021 dimana setelah pemberlakuan wajib oleh POJK 51 di tahun 2019 yang paling lambat diungkapkan pada 30 April 2020. Dengan adanya gap dari hal tersebut maka menarik untuk ditelusuri lebih lanjut akan laporan keberlanjutan yang diungkapkan kepada publik.



Gambar 1 Kerangka Penelitian
Sumber Gambar : diolah oleh penulis

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder yang dimaksud berupa teknik dokumentasi menggunakan laporan keberlanjutan TMS 2021 dimana akan dianalisis kemudian dievaluasi kelengkapan dalam sebuah laporan keberlanjutan, setiap *item* pengungkapan wajib dalam Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan yang terlampir dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.04/2021 harus ditelusuri keberadaan informasinya dalam laporan keberlanjutan PT TMS 2021. Kemudian, bukan hanya berdasarkan kelengkapan namun kualitas informasi dari setiap *item* yang diungkapkan harus dianalisis dengan menggunakan acuan berupa standar GRI dan SEOJK 16.

Selain itu, pengumpulan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak *corporate secretary* sebagai pendukung guna menggali urgensi pelaporan keberlanjutan hingga proses pembuatan laporan keberlanjutan sehingga bisa membandingkan apa yang dituangkan di dalam laporan tervalidasi benar adanya.

HASIL

Hasil wawancara dengan Ibu X selaku narasumber dari PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TMS) yang dilakukan pada 14 November 2022 diperoleh informasi bahwa perusahaan sudah lama melakukan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) namun baru mengungkapkan dalam sebuah laporan keberlanjutan di tahun 2021 dengan alasan utama karena adanya kewajiban atas pengungkapan tersebut dalam POJK 51. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan hasil wawancara berikut:

“Prinsipnya kalau berkelanjutan secara keuangan, sosial ataupun lingkungan sudah kami (TMS) lakukan sejak lama namun belum dituangkan ke dalam laporan dan baru dilaporkan pada tahun buku 2021 ini karena TMS berupaya dalam memenuhi compliance pemerintah” Ibu X

Ibu X menyadari akan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam laporan keberlanjutan TMS pada periode 2021 sehingga menyatakan:

“Laporan merupakan sebuah hal yang dinamis, sehingga TMS akan terus berusaha untuk berevolusi dalam mengeluarkan sebuah laporan yang lebih baik lagi kedepannya” Ibu X

Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Dalam bagian pertama di SEOJK 16 berupa penjelasan strategi keberlanjutan sebagaimana memuat uraian mengenai implementasi atas visi dan misi penerapan keuangan berkelanjutan secara komprehensif mencakup target waktunya, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai. Pada laporan keberlanjutan TMS 2021 mengungkapkan strategi keberlanjutannya bahwa TMS menunjukkan salah satu bentuk keseriusan TMS dalam mengimplementasi praktik keberlanjutan, yaitu dengan memfokuskan pada tiga aspek mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selain itu, informasi tambahan mengenai strategi keberlanjutan TMS yang belum diungkapkan TMS adalah menjaga kredibilitas manpower sebagaimana ditekankan bahwa TMS sangat memberikan perhatian lebih kepada para karyawannya bukan hanya sebatas *feedback* dalam bentuk imbalan gaji namun dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa membuat nyaman dalam bekerja. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu X:

“Pencemaran bukan hanya lingkungan aja sekarang namun bisa pencemaran secara moral itu bisa berpengaruh ke lingkungan kerja atau karyawan (manpower) namun belum ada peraturan khusus dari pemerintah mengenai penjagaan pencemaran moral karyawan biar gimapun juga aset perusahaan yang penting adalah karyawan, karena jika karyawan sudah tercemar moralnya maka akan berdampak pada kinerja pekerjaannya sehingga perusahaan juga memfokuskan berkelanjutan pada manpower yang harus dimaintain.” Ibu X

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat diikhtisarkan bahwa penjelasan strategi keberlanjutan yang diungkapkan TMS masih bersifat mengeneralisasi sehingga belum diklasifikasikan ke dalam jangka waktu baik jangka pendek, menengah dan panjang dan juga TMS tidak menyebutkan target keberlanjutan yang ingin dicapai perusahaan.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Bagian kedua dalam SEOJK 16 mengindikasikan bahwa perusahaan perlu mengungkapkan ringkasan atas kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dalam tiga tahun terakhir. Dalam pengungkapan di laporan keberlanjutan TMS 2021 menunjukkan bahwa secara aspek ekonomi sudah memuat tabel yang berisikan kuantitas produksi dan penjualan serta nominal pendapatannya,

laba bersih perusahaan dan juga jumlah tenaga kerja lokal selama tiga tahun terakhir. Namun hal tersebut masih terdapat kekurangan bahwa TMS tidak melampirkan jumlah produk ramah lingkungan dalam tiga tahun terakhir dan tidak ada informasi tambahan mengenai hal tersebut sudah dilakukan atau belum di perusahaan.

Selanjutnya, iktisar kinerja keberlanjutan yang perlu diungkapkan yaitu terakit dengan aspek lingkungan hidup paling sedikit mencakup informasi penggunaan listrik dan air, pengurangan emisi, pengurangan limbah dan enfluen selama tiga tahun terakhir. Dalam aspek lingkungan hidup TMS sudah menyertakan tabel yang berisikan ketentuan dari SEOJK dan juga informasi tersebut lebih bermanfaat dan mudah dimengerti karena menambahkan perbandingan atas pengungkapannya baik aspek ekonomi dan lingkungan hidup.

Aspek sosial yang diungkapkan TMS di laporan keberlanjutan harus mencakup penjelasan atas dampak positif dan negatif penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan serta adanya upaya dalam meminimalisir dampak negatif. TMS mengungkapkan:

“TMS berupaya untuk berkontribusi untuk masyarakat sekitar, dari tahun ke tahun TMS terus berkontribusi dalam bentuk kegiatan santunan anak yatim, pembagian hewan kurban, donasi untuk kesejahteraan dan keamanan serta bantuan dana perayaan kemerdekaan di lingkungan TMS. Namun khusus tahun 2021, Perseroan memfokuskan untuk memfasilitasi pemberantasan Covid 19, bekerja sama dengan pemerintahan/kelurahan di mana TMS berdomisili”. (TMS, 2021)

Dengan demikian bahwa TMS baru menginformasikan hal yang berdampak positif namun tidak ada informasi mengenai hal negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan. Kemudian, pada aspek sosial TMS belum memuat kenaikan ataupun target atas kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan.

Berdasarkan analisis yang sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa bagian iktisar kinerja keberlanjutan TMS yang diungkapkan sudah memenuhi kriteria SEOJK 16 namun atas kualitas isi masih belum memuat informasi penjelasan yang lengkap karena TMS tidak menarasikan apa yang ada di dalam tabel aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup meskipun sudah melakukan perbandingan selama tiga tahun sebelumnya dan pada aspek sosial juga masih belum komprehensif.

Profil Perusahaan

Hal yang diwajibkan lainnya dalam SEOJK 16 adalah mengungkapkan profil perusahaan mencakup: visi, misi dan nilai-nilai keberlanjutan, alamat perusahaan, skala usaha, produk dan kegiatan usaha yang dijalankan, keanggotaan pada asosiasi, dan perubahan emiten yang signifikan.

Pada laporan keberlanjutan TMS 2021 terdapat secara eksplisit visi, misi, nilai-nilai keberlanjutan, dan alamat perusahaan. Namun pada bagian nilai-nilai keberlanjutan TMS *“keterbukaan, adil, bersih, jujur dan agresif”* masih bersifat umum sebagaimana tidak disertakan penjelasan atas setiap nilai sehingga belum bisa memastikan dalam menyinggung dari unsur keberlanjutan. Pengungkapan hal-hal ini termasuk dalam pengungkapan GRI 102-1, 102-2 dan 102-16.

Kemudian, TMS sudah melampirkan skala usaha yang mencakup total aset dan total kewajiban; jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, komposisi, dan usia; pemegang saham dan presentase kepemilikan. TMS juga mengungkapkan bidang usaha yang dijalankan dalam bidang industri memproduksi tembaga dan aluminium dalam bentuk kawat batangan, serta produk-produk kawat sebagaimana hal-hal tersebut sehubungan dengan GRI 102-7 dan GRI 102-5.

Komponen SEOJK 16 lainnya yang sudah diungkapkan TMS adalah wilayah operasionalnya, hal tersebut memenuhi GRI 102-3 dan GRI 102-4. Selanjutnya, TMS juga mengungkapkan keanggotaan pada asosiasi dimana TMS bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

sebagaimana berkaitan dengan GRI 102-13. Baik seperti itu namun perseoran belum menjelaskan secara lebih detail mengenai tahun bergabung, peran dari asosiasi tersebut dan juga kegiatan rutin dari aktifitas tersebut. Terakhir, perusahaan tidak ada hal-hal mengenai perubahan baik perubahan organisasi sehubungan dengan merger ataupun akuisisi sepanjang tahun 2021 sesuai GRI 102-10

Dapat disimpulkan bahwa profil perusahaan yang diungkapkan oleh TMS sudah sesuai SEOJK 16 namun belum inklusif dan apabila berdasarkan GRI 2021, TMS sudah memenuhi beberapa pengungkapan standar GRI.

Penjelasan Direksi

Pada penjelasan direksi menurut SEOJK 16 diwajibkan mengungkapkan tiga komponen utama yang harus dibahas seperti kebijakan dalam menanggapi tantangan keberlanjutan, penerapan keuangan keberlanjutan, dan strategi pencapaian target.

Komponen terkait kebijakan dalam menanggapi tantangan strategi keberlanjutan, merupakan uraian nilai dan cara penyebaran nilai tersebut dimana TMS menanamkan nilai-nilai keberlanjutan "*terbuka, adil, bersih, jujur dan agresif*" dalam melakukan pekerjaan di lingkup perusahaan yang disimpulkan TMS ingin memastikan bahwa semua insan perusahaan dapat beraktifitas dengan tujuan dan etika yang berseragam guna dijadikan pondasi penting untuk membanding budaya positif dalam tataran internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian, penguraian isu-isu keberlanjutan perusahaan dan tanggapan perusahaan namun TMS menyebutkan bahwa "*.....belum terlihat isu-isu yang berpotensi menghambat keuangan keberlanjutan...*" meskipun begitu TMS menambahkan bahwa kewaspadaan atas kondisi yang dinamis seperti Covid-19 dan juga memperhatikan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Pengungkapkam komitmen dalam menerapkan keuangan keberlanjutan dapat memenuhi komponen kebijakan dalam menanggapi tantangan, dimana TMS telah berkontribusi secara langsung terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan fokus 4 (empat) kontribusi Perseroan yang mana disebutkan dalam laporan keberlanjutan 2021 "*..... TPB No. 5 – Kesetaraan Gender, TPB No. 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB No. 12 – Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, dan TPB No. 13 – Penangan Perubahan Iklim*" dengan itu TMS membuktikan bahwa aktivitas, bisnis, produk dan jasa perusahaan dapat dikorelasikan dengan dukungan kontribusi perusahaan pada TPB tersebut.

Selain itu, TMS memuat beberapa pencapaian kinerja keberlanjutan dalam 3 (tiga) aspek pada laporan keberlanjutan 2021. Aspek ekonomi diungkapkan "*...pendapatan dan laba bersih Perseroan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 dengan kenaikan 54%*" kemudian aspek lingkungan tergambar bahwa "*...perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 1400:2015 untuk sistem Manajemen Lingkungan yang dikeluarkan oleh SGS dan berlaku hingga 2024.*" Untuk aspek lingkungan perseroan menyatakan "*memfasilitasi pemberantasan Covid-19 bekerja sama dengan pemerintah/kelurahan wilayah Perseroan beroperasi.*" Dengan penjabaran 3 (tiga) aspek tersebut belum memenuhi kualitas SEOJK, dimana TMS baru melakukan evaluasi pencapaian yang dibandingkan dengan target hanya aspek ekonomi yang dapat dikatakan bersifat hasil dari operasional perusahaan.

Kemudian, TMS belum selaras dengan SEOJK 16 pada menungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan karena TMS menyatakan "*Implementasi keuangan berkelanjutan berupa regulasi yang baru saja dimulai, sehingga Perseroan perlu penyesuaian...*" sedangkan SEOJK 16 menjelaskan bahwa penjelasan direksi di sini berupa penjelasan singkat atas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan dengan jangka waktu tertentu.

Komponen kedua dalam penjelasan direksi bahwa diharuskan adanya penjelasan penerapan keuangan keberlanjutan dimana hal pertama yang diungkapkan TMS mengenai pencapaian kinerja penerapan keuangan keberlanjutan berupa pencapaian atas target pendapatan dan laba yang sudah

ditentukan. Untuk aspek lingkungan hidup, TMS berupaya mengurangi intensitas penggunaan energi sehingga emisi yang dihasilkan hanya sebesar 0,27 Tco2E. Untuk aspek sosial, perseroan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu X:

“PT TMS saat era Covid-19 terus berupaya untuk memberikan atau berkontribusi dalam memperhatikan lingkungan dengan aksi nyata memberikan masker, handsanitizer dan keperluan lainnya terkait memberantas rantai Covid-19” Ibu X

Komponen ketiga berupa strategi dalam mencapai target. Pada laporan keberlanjutan 2021 TMS menyatakan *“Perseroan mengawali dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha”* namun belum ada penjelasan lebih lanjut cara perusahaan mengidentifikasi risiko atau pengolahan risiko, melainkan TMS menyebutkan sudah mengimplementasi sistem manajemen risiko. Hal lain yang perlu disampaikan adalah pemanfaatan peluang dan prospek usaha, TMS memiliki dua peluang baik dari dalam negeri berupa *“..... Mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2024”* dimana prospek menjadi pemasok dan untuk luar negeri adalah adanya peningkatan ekspor namun TMS tidak menyebutkan bekerja sama dengan negara mana saja. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa adanya faktor eksternal bisa menghambat operasional keberlanjutan TMS seperti Covid-19.

Tata Kelola Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan perlu memuat informasi berkaitan atas komitmen perusahaan dalam menjelaskan praktik tata kelola keberlanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Komponen pertama dalam tata kelola berkaitan dengan penanggung jawab atas penerapan keberlanjutan dimana TMS diketahui belum memiliki divisi khusus mengenai keberlanjutan atau divisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* melalui ungapannya *“Presiden direktur mendelegasikan kepada Direktur bersama jajarannya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai berikut...”*

Komponen selanjutnya berupa unguapan atas penjabaran pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan bagi unit yang bertanggung jawab terhadap praktik keberlanjutan perusahaan. TMS mengungkapkan melalui tabel yang berisikan 12 (dua belas) nama karyawan disertai jabatan, tema atas pelatihan dan juga penyelenggara atas pelatihan yang terlaksanakan dengan kutipan *“Untuk mendukung penerapan keuangan keberlanjutan, perseroan telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan”*. Pelatihan yang diberikan mencakup atas pengungkapan GRI 404-2.

Selanjutnya, TMS masih belum mengungkapkan secara komprehensif mengenai evaluasi risiko yang berpotensi terjadi dalam perusahaan sedangkan OJK (2021) menjelaskan evaluasi atas prosedur manajemen risiko terkait keberlanjutan perlu memuat penjelasan atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Kemudian, pengungkapan dalam melakukan identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan TMS menilai atas dasar tingkatan seberapa besar pengaruh seseorang atau sebuah organisasi terhadap keberlangsungan usaha dengan metode yang dikutip *“Untuk menentukan siapa saja yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan melalui observasi.”* Observasi yang diungkapkan oleh TMS tidak dijelaskan dilakukan oleh siapa dan informasi mengenai waktu observasi seperti yang dikatakan pada SEOJK 16. Selain identifikasi pemangku kepentingan TMS juga mengungkapkan bagaimana cara perusahaan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan yaitu dengan menjalin interaksi dan melibatkan pemangku kepentingan, namun tidak ada penjelasan frekuensi interaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini memenuhi GRI 102-42.

Komponen terakhir berupa TMS menguraikan permasalahan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan yaitu dalam mengedukasi karyawan dan stakeholder agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan dengan target bahwa seluruh karyawan bisa memiliki kesadaran dalam hal keberlanjutan. Namun tidak dikuti dengan pengungkapan atas solusi dari tantangan tersebut.

Kinerja Keberlanjutan

Kinerja Keberlanjutan yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan menyesuaikan SEOJK 16 dengan minimal menyinggung hal: (1) penjelasan terkait kegiatan dalam membangun budaya keberlanjutan dan internal perusahaan; (2) uraian kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir; (3) kinerja lingkungan hidup; (4) kinerja sosial selama tiga tahun terakhir; (5) kinerja lingkungan hidup yang bisnisnya berhubungan langsung dengan lingkungan hidup; (6) tanggung jawab pengembangan produk berkelanjutan.

Aksi nyata dari TMS dalam menunjukkan komitmen untuk serius membangun budaya keberlanjutan dalam perusahaan, dimana kebijakan lainnya berkenaan dengan mutu dan lingkungan dilaksanakan secara terus menerus dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak serta direview secara berkala, namun wewenang dari melakukan review atas kebijakan tersebut tidak disebutkan dalam laporan keberlanjutan TMS.

Kedua, memuat kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir mencakup target. TMS telah melakukan pemaparan kinerja produksi, penjualan dan realisasi laba/rugi melalui tabel dalam laporan keberlanjutan 2021. Selain itu Perseroan menyatakan bahwa pada tahun 2021 tidak melakukan kegiatan investasi atau sejenisnya yang diungkapkan dalam komponen SEOJK 16.

Ketiga, mengenai kinerja lingkungan hidup yang dalam pelaksanaan dari komitmen menjaga lingkungan pada aspek umum TMS mengungkapkan bahwa *“Atas kegiatan aspek lingkungan ini, pada tahun 2021 Perseroan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 84.409.500”*. Langkah lainnya di lingkup aspek material diikuti dengan pemilihan bahan baku pengemasan dengan melakukan metode *life cycle perspective* berupa daur ulang dan penggunaan ulang dalam kegiatan administrasinya. Kemudian, aspek energi (pengungkapan GRI 302-1, GRI 302-3) masih dalam cakupan kinerja lingkungan hidup yang mana TMS menguraikan melalui tabel jumlah dan intensitas energi yang digunakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir meskipun demikian hal tersebut belum menyesuaikan dengan SEOJK 16 dikarenakan berdasarkan regulasi tersebut perusahaan harus menyertakan metode dan standar yang digunakan dalam menghitung pemakaian energi, dengan demikian akan memberikan informasi yang lebih rinci kepada pembaca.

TMS juga mengungkapkan metode dalam melakukan efisiensi energi *“.....Perseroan melakukan Total Preventive Maintenance (TPM), yaitu metode yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas mesin melalui perawatan / maintenance peralatan.”* Dengan dukungan penjelasan lebih lanjut dalam implementasi TPM dari hasil wawancara:

“Cara mengimplementasiannya pada TMS berupa Departemen Maintenance (Electric, Mechanic, dan Utility) melakukan analisa awal untuk setiap mesin proses produksi. Dari data harian, dan data bulanan tersebut maka dilakukanlah perencanaan perawatan secara berkala, dan preventive, sehingga mesin dapat berfungsi dengan baik. Jika dari analisa-analisa harian dan periodic bulanan tersebut mengindikasikan adanya potensi kerusakan, maka dilakukan perencanaan sehingga perbaikan dapat berjalan tanpa mengganggu proses produksi” Ibu X

Penjelasan selanjutnya yang diungkapkan terkait penggunaan air (pengungkapan GRI 303-5) untuk kegiatan operasionalnya melalui tabel aspek air pada laporan keberlanjutan 2021, TMS sudah memaparkan secara komprehensif atas pengelolaan air dengan *“Upaya yang dilakukan untuk efisiensi penggunaan air adalah menggunakan evaporator untuk mendaur ulang air yang telah digunakan dan menyalurkan semua air buangan AC ke pit penampungan agar dapat digunakan kembali untuk proses produksi”*. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan penggunaan air sebesar 11.984M3 dari tahun sebelumnya dan tidak ada informasi mengenai kenaikan tersebut.

Pengungkapan aspek emisi (pengungkapan GRI 305-7) juga terdapat pada laporan keberlanjutan TMS 2021 melalui tabel aspek emisi yang berdirikan jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan dengan perbandingan 3 (tiga) tahun terakhir namun pengungkapan tersebut belum memuat metodologi dan standar yang digunakan dalam menghitung emisi. Selain itu, informasi

atas limbah dan influen juga penting diungkapkan melalui tabel yang berisikan limbah berbahaya (pengungkapan GRI 306-1, GRI 306-2, dan GRI 306-4) yang dihasilkan dan limbah yang diangkut diikuti dengan tabel efluen atas total volume air yang dibuang dan persentase air yang didaur ulang. TMS melakukan proses IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum dibuang ke kali mookervart dengan informasi tambahan dari hasil wawancara:

“Seumpamanya seperti perusahaan akan melakukan tester ke kolam ikan, apabila ikannya masih hidup berarti kandungan airnya aman untuk dilepaskan ke saluran akhir” Ibu X

Keempat, kinerja keberlanjutan memuat kinerja sosial dalam tiga tahun terakhir. TMS menyertakan penjelasan bagaimana produk yang dihasilkan bisa memenuhi berbagai konsumen “.....dalam kebijakan manajemen mutu, perseroan menjamin produk yang dihasilkan bermutu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan, dan kepuasan pelanggan....”. Selain konsumen, kinerja sosial juga berkaitan dengan ketenagakerjaan dimana “Perseroan memberika perlakuan yang sama untuk seluruh karyawan yang dideklarasikan pada Perjanjian Kerja Sama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Kerja” yang menandakan TMS sudah menerapkan kesetaraan atas kesempatan bekerja karyawannya dan juga TMS menjamin tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur terbukti dari data usia karyawan TMS yang paling muda berusia 18-25 tahun. Kemudian juga untuk pemberian imbalan TMS sudah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). Meski demikian, TMS pada laporan keberlanjutan tahun 2021 belum memuat tentang presentase remunerasi karyawan tetap di tingkat terendah terhadap UMR yang disebutkan pada SEOJK 16.

Indikator lainnya yang masih berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang diungkapkan oleh TMS berupa kepedulian terhadap manpowernya dengan melakukan kewan, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan (K3) “Perseroan memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kerja yang sesuai dengan Peraturan dari instansi terkait” hal tersebut memenuhi GRI 403-1. TMS juga memberikan fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan Dokter yang mana mencakup GRI 403-3. Tidak hanya itu, Para tenaga kerja di TMS juga diberikan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan dengan “.....secara rutin Perseroan mengikutsertakan dan mengadakan beberapa pelatihan seperti evakuasi kebakaran, pengecekan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), hingga pelatihan terkait K3.” Begitu banyak upaya dan fasilitas yang diberikan oleh TMS guna menjaga kestabilan manpower agar tidak tercemar merupakan bukti nyata yang baik diantaranya mencakup dalam GRI 403-4, DAN gri 403-5. Namun adapun penjelasan tambahan yang diberikan oleh Ibu X selaku narasumber yaitu “5S merupakan aktifitas Ringkas, Rapih, Resik, dan Rajin. Dilakukan melalui training terhadap karyawan, dan dievaluasi melalui patrol oleh manajemen setiap minggu.”

Adapun pernyataan yang tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan namun ternyata TMS menyediakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi kayawannya melalui program lainnya yaitu di bawah tanggung jawab fungsi *Safety, Health dan Environment (SHE)* dimana bertujuan untuk mencapai 0 (nol) kecelakaan, pemberian vitamin kepada karuawan secara berkala, dan menjaga kelestarian lingkungan sehingga memenuhi GRI 403-4. Informasi tersebut didapat dari hasil wawancara TMS.

Sebagai bukti kuantitatif atas pelatihan dan pengembangan yang dilakukan (pengungkapan GRI 404-2), TMS mengungkapkan melalui tabel uraian pelatihan karyawan baik berdasarkan gender, jumlah pekerja berdasarkan jabatan dan jumlah jam pelatihan. Namun pada tabel tersebut belum ada pengungkapan yang berkaitan dengan persentase karyawan yang mendapatkan tinjauan rutin atas kinerja. Hal tersebut dapat dikatakan penting guna menunjukkan atensi perusahaan terhadap pengembangan karir dan kesejahteraan karayawan.

Kinerja sosial juga berkaitan dengan aspek masyarakat yang sesuai dengan kriteria dari SEOJK 16. Selain itu, mengingat lokasi operasional TMS berdampingan dengan masyarakat sehingga

berpotensi adanya dampak positif maupun negatif yang diberikan oleh TMS dengan pengungkapannya "*Perseroan telah berupaya meminimalisir dampak tersebut dengan berbagai cara diantaranya mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan dan penanganan atas potensi dampak tersebut, melakukan Pemantauan dan pengujian aspek-aspek lingkungan secara rutin seperti asap, limbah cair, kebisingan, agar lingkungan masyarakat terjamin.*" Kemudian, TMS juga mengutamakan penyerapan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan melakukan berbagai program seperti *chairity* kegiatan CSR. Kegiatan tersebut memenuhi GRI 413-1.

TMS membuka kesempatan bagi masyarakat atas pengaduan dengan ungkapan "*Masyarakat dapat langsung berkomunikasi kepada Penasehat Hukum Perseroan.*" Namun informasi tersebut kurang mudah diakses untuk semua kalangan masyarakat karena belum memuat nama penasehat hukum perseroan dan nomor kontak yang bisa dihubungi, sehubungan dengan pengungkapan GRI 102-17. Kemudian, pada akhir tahun 2021 TMS tidak memiliki pengaduan dari masyarakat. Aspek masyarakat terakhir berupa pengungkapan kegiatan TJSL. TMS memiliki 4 jenis kegiatan TJSL diantaranya rekrutmen karyawan, rekrutmen karyawan terbuka untuk usia muda dan pendidikan SMA/Sederajat, melakukan *life cycle perspective* dan *re-charging* dan menerapkan TPM. Namun, program-program yang sudah diungkapkan belum ada program yang dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat hanya baru berkaitan dengan operasional bisnis perusahaan.

Komponen terakhir mencakup atas tanggung jawab pengembangan produk keberlanjutan. TMS menyatakan bahwa belum melakukan inovasi terhadap produk keberlanjutan melainkan "*Perseroan telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses produksinya yang sejalan dengan bisnis berkelanjutan.*" Perbaikan tersebut berupa dari bahan baku pengemasan yang digunakan oleh TMS. Kemudian adapun perbaikan lainnya seperti "*Melakukan re-charging peleburan sisa material tembaga dari sisa proses.*" dan "*Mengurangi konsumsi kertas dengan menggunakan media elektronik.*" Uraian yang dijelaskan dalam laporan keberlanjutan tersebut telah cukup menunjukkan upaya TMS dalam berinovasi untuk proses produksi yang lebih baik dan ramah lingkungan, sehingga kedepannya TMS bisa membuat produk inovasi.

Masih dalam menjawab atas tanggung jawab pengembangan produk keberlanjutan dimana TMS mengungkapkan bahwa "*Produk yang dihasilkan dikemas dalam gulungan karton dan kotak karton, dan dilekatkan label "QA Passed, dimana telah melalui uji kualitas."*" Hal tersebut kurang memaparkan penjelasan persertanse yang harusnya disertakan pada pengungkapan tersebut guna menekankan bahwa memang TMS sudah melakukan *QA Passed* untuk seluruh produknya sebelum didistribusikan ke pelanggan. Sebagaimana hal tersebut masuk dalam cakupan GRI 417-1.

TMS menyadari akan bahaya dari produk yang diciptakan mengingat lini bisnis perusahaan tersebut sehingga menyatakan "*Perseroan memberi label spesifikasi dan symbol bahaya pada produknya secara jelas, sehingga pelanggan dapat melakukan pengaplikasian sesuai dengan spesifikasi symbol yang tertera.*" Oleh karena itu, pada tahun 2021 TMS tidak memiliki produk yang ditarik kembali. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa TMS sangat peduli dengan keamanan produk dan juga keamanan pelanggannya, pengungkapan hal tersebut termasuk dalam GRI 417-1. Namun TMS belum membuktikan atas kepuasan pelanggan karena perseroan belum melakukan survey atas kepuasan pelanggan.

Lain-lainnya

POJK 51 mengungkapkan perusahaan untuk melampirkan verifikasi tertulis dari pihak independen jika perusahaan menggunakan pihak independen dalam menilai laporan keberlanjutannya. TMS menyatakan bahwa "*Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Perseroan belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen. Namun demikian, Perseroan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan factual*". Namun penggunaan pihak independen dapat meningkatkan tingkat kredibilitas dari laporan keberlanjutan karena adanya validitas data dan pengungkapan yang bersifat objektif. Hal

ini bisa dijadikan pertimbangan perusahaan agar laporan keberlanjutan perusahaan bisa terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi.

Pada tanggapan terhadap umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya TMS belum bisa menguraikan informasi terkait mengingat bahwa Laporan Keberlanjutan tahun buku 2021 merupakan laporan yang pertama kali yang diterbitkan oleh perseroan. Hal tersebut memenuhi pengungkapan GRI 102-53.

PEMBAHASAN

Hasil dokumentasi atas laporan keberlanjutan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk mengindikasikan bahwa sudah sesuai secara konten namun secara kualitas isi masih belum memuaskan karena apabila melihat contoh yang diberikan pada SEOJK 16, TMS belum mengungkapkan penjelasan secara komprehensif. Kemudian, pada laporan keberlanjutan 2021 TMS sudah ada yang mencakup dalam pengungkapan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *corporate secretary*, diperoleh banyak informasi yang belum dijelaskan secara komprehensif pada laporan keberlanjutan TMS 2021. Selain itu, pihak *corporate secretary* juga sudah memastikan bahwa TMS telah melakukan program keberlanjutan ataupun CSR sejak lama dikarenakan memang TMS tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kegiatan operasional terhadap masyarakat sehingga hal tersebut sejalan dengan teori legitimasi. Dalam teori tersebut TMS mencoba bahwa kegiatan operasinya selalu mematuhi norma-norma dan batasan masyarakat guna bisa diterima baik oleh masyarakat. Dengan pemberlakuan atas POJK 51 pasal 10 akan wajibnya melaporkan laporan keberlanjutan bagi entitas terbuka tidak dipungkiri merupakan satu hal yang mendorong TMS dalam menerbitkan laporan keberlanjutan 2021. Hal terkonfirmasi dengan hasil wawancara, dengan demikian sejalan dengan teori institusional. Institusi memberikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh organisasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendeklarasi bahwa laporan keberlanjutan 2021 memang sudah mengungkapkan sepenuhnya komponen yang ada di SEOJK namun belum memberikan penjelasan secara rinci dan informatif dan juga belum memenuhi kualitas standar *Global Reporting Initiative (GRI)* 2021. Dengan demikian diharapkan untuk PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TMS) dalam memperhatikan kekurangan atas penjabaran informasi yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan di tahun selanjutnya sehingga lebih berkualitas dan komprehensif.

REFERENSI

- DiMaggio, P. J., & Powel, W. W. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Freeman, R. E., Parmar, B. L., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Academy of Management Annals*, 4(1), 403–445. <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>
- Hasanah, H., & Rudyanto, A. (2020). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Equity*, 22(2), 215–238. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.932>
- Kanigoro, B. Y. (2020). Pelaporan Berkelanjutan Oleh Perguruan Tinggi Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58799>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Prayudi, T. (2005). *Dampak Industri Peleburan Logam Fe*. 2, 385–390.
- Ramadani, A. K. (2019). Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Tahun 2016 dan 2017 Berdasarkan Standar Global Reporting Initiative



(GRI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 561(3), S2–S3.

Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2017). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report. *International Journal of Ethics and Systems*.

SEOJK 16. (2021). *SEOJK 16. 1*(March), 1–19.

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>

Tarigan, J., & Samuel, H. (2015). Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 88–101. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101>

TMS. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 42.

Zharifah, N. (2021). *Keberlanjutan dan Strategi Keberlanjutan Pasca Penerapan POJK 51 : Studi Kasus PT Dharma Satya Nusantara Tbk.*